

KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Pakat Sitinjak¹⁾

Kemenag Maluku Utara/ Tokoh Agama Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 25-Mei-2023

Tulisan direvisi

Tanggal 08-Juni-2023

Tulisa diterima

Kembali tanggal 18-Juni-2023

Korespondensi penulis

Email :

pakat.sitinjak18@gmail.com

Kontak Seluler:

081266730700

Abstract

Indonesia is a rich nation with diversity, so that democracy becomes a real concept to forming the character of the Indonesian nation. At this time, democracy is not only understood as a form or system of government, but becomes the live pattern of nation and state. So that democracy society is interpreted as the order of society in a region that has the noble ideals in realizing prosperity for the whole through the context of democracy as an effective tool and space to realize it.

Keywords:

Society of Democracy, Plural, Welfare, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragamannya, sehingga demokrasi menjadi konsep yang nyata dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Pada saat ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk atau sistem pemerintahan saja, akan tetapi menjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat demokrasi dimaknai sebagai tatanan masyarakat di dalam suatu wilayah yang memiliki cita-cita luhur dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruhnya melalui konteks demokrasi sebagai alat dan ruang yang efektif untuk merealisasikannya.

Kata kunci:

Masyarakat Demokrasi, Plural, Kesejahteraan, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragamannya, sehingga Indonesia digambarkan bak surga melalui lagu Kolarn Susu yang dipopulerkan oleh Koes Plus, dengan penggalan liriknya yang memorable seperti berikut.

"...Bukan loutan hanya kolom susu Koil don jalan cukup menghidupimu Tiada badai tiada topan kau temui lkon don udang menghampiri dirimu Bukan louton hanya kolorn susu Kail don jala cukup menghidupmu Tiodo badai tiada Capon kau temui lkon don udong rnenghompri dirimu Orang bilang tanah kits tanah surga Tongkot kayu don batu jadi tonamon Orang bilang tanah kits tanah surga Tongkah kayu dan batu jadi tonaman."

(Sumber:

<https://www.wowkeren.com/lirik/lagu/koes-plus/kolam-susu.html>)

Penggambaran lirik diatas benar adanya, dimana Indonesia tanah surga yang harus dijaga dengan kepala dingin, hati lembut dan tangan keras. Artinya Indonesia membutuhkan tatanan masyarakat yang berjiwa berkorban demi mewujudkan Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi*.

Pada masa sekarang, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan

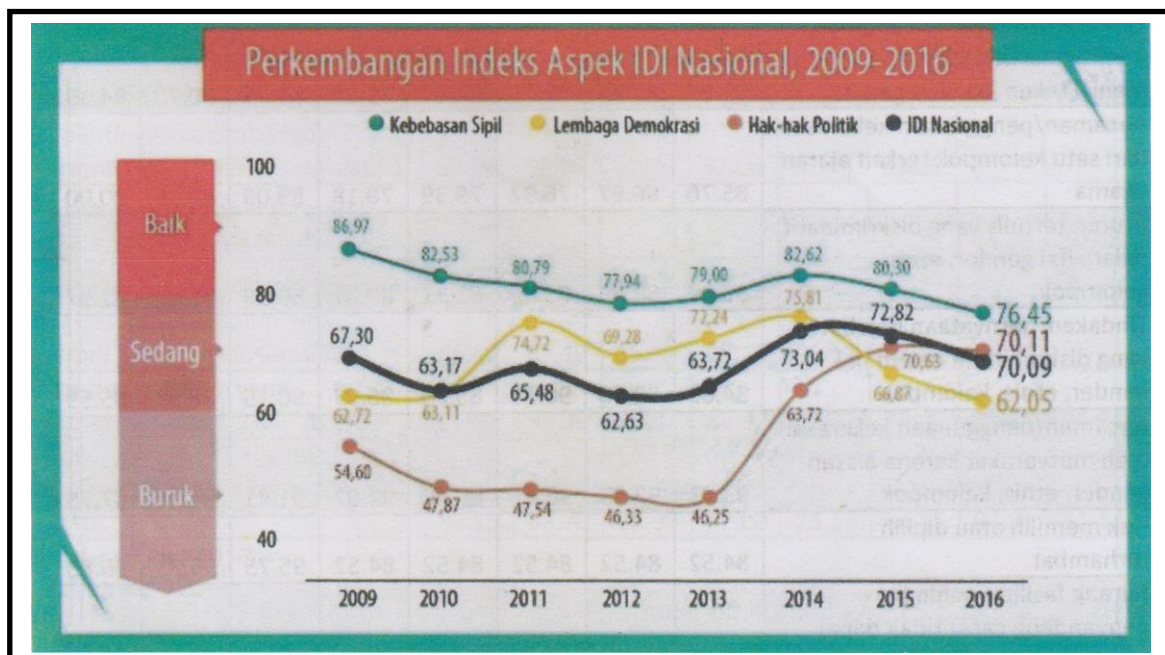
saja, tetapi rnenjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga demokrasi sebagai pola hidup dan pola sikap berbangsa dan bernegara tidak hanya membutuhkan pemerintahan demokrasi, tetapi juga budaya demokrasi.

Budaya demokrasi sangat perlu dikembangkan di masyarakat, mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga sampai pada lingkungan besar, yaitu kehidupan bernegara, hingga pada pergaulan internasional. Masyarakat yang memiliki budaya demokrasi akan sangat mendukung kelangsungan hidup negara demokrasi. Secara penerapannya di Indonesia, demokrasi diterjemahkan dalam suatu kedaulatan yang berada ditangan rakyat, secara ideologi berdasarkan kepada pemahaman Demokrasi Pancasila, yaitu 1) demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan; 2) sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan; rakyat; dan 3) dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi haws diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Penurunan IDI pada 2016 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kedua, hak-hak

politik yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11. Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin, dari 66,87 menjadi 62,05. (diakses melalui laman <https://news.detik.com/beritaid-3643018/bps-indeks-demokrasi-indonesia-turun>, 10 Januari

Gambar 1. Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009-2016



Sumber: BPS, 2017

Sedangkan operasionalisasi dari angka-angka mengenai perkembangan indeks aspek IDI nasional diatas, maka untuk mengetahuinya secara lengkap, berikut dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDM) Menurut Indikator)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah kebebasan berkumpul dan berserikat	91.21	84.55	91.21	80.00	85.76	80.00	86.76	82.35
Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	93.03	89.85	95.15	82.27	88.18	95.00	85.85	85.85
Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83.43	73.03	68.38	65.45	73.54	68.89	65.32	76.47
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.70	90.65	86.96	85.24	82.35	81.95	80.43	81.71
Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.97	83.86	83.71	81.67	78.18	81.06	80.79	84.19
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85.76	86.67	76.97	79.39	78.18	89.09	80.15	80.00

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat kaarena alasan gender, etnis, kelompok	93.03	92.50	95.45	88.48	92.02	91.41	91.18	87.75
Hak memilih atau dipilih terhambat	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	95.75	95.83	95.83
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	75.80	74.44	74.44
Voters Turnout	73.82	73.82	73.82	73.82	73.82	75.26	75.07	75.07
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	52.07	51.41	52.77	54.30	54.84	52.39	53.49	54.29
Demokrasi/mogok yang bersifat kekerasan	81.75	47.47	35.70	19.12	18.71	23.73	34.14	43.06
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	28.56	49.17	56.24	69.91	72.51	76.83	87.04	77.21
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	91.46	91.46	91.46	91.46	91.46	98.90	98.93	98.93
Kecurangan dalam penghitungan suara	83.89	83.89	83.89	83.89	83.89	91.83	92.03	92.03
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	54.12	62.50	65.32	0.00	48.59	49.58	57.23	60.86

capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. IDI mulai dihitung oleh BPS pada tahun 2009 dan mencapai 67,30. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2014 sebesar 73,04. Namun kembali turun di tahun 2015 menjadi 72,82, hingga tahun 2016 mencapai 70,09.

Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1	92.04	92.04	92.04	92.04	92.04	99.90	-	-
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	44.85	30.88
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1	85.12	85.12	85.12	85.12	85.12	98.65	-	-
Keputusan hakim yang kontroversial	85.91	90.30	76.97	86.97	92.73	88.03	92.65	91.54
Penghentian	95.15	89.70	86.97	77.88	75.15	84.55	91.91	91.18

Kecuk Suhariyanto (2017), menyatakan bahwa Turun atau naiknya Indeks Demokrasi Indonesia ini tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tapi perkembangan demokrasi ini sangat tergantung kepada aspek peran masyarakat, lembaga legislatif dalam hal ini DPRD di 34 provinsi, juga peran serta partai politik, dan penegak hukum. Apabila dilihat

Data mengenai Indeks Demokrasi Indonesia memberikan kita penjelasan, bagaimana Indonesia dalam konteks demokrasi masih dalam tahapan penyesuaian, dimana data yang fluktuatif dialami atas beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya

adalah peran serta partai politik, pers dan penegak hukum.

Melihat pernyataan diatas, maka masyarakat demokrasi merupakan elemen yang signifikan dalam membangun bangsa yang kuat, dimana salah satu syarat penting bagi berlangsungnya demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Pembahasan Menyikapi Sebuah Perbedaan

Menyikapi perbedaan bukanlah perkara mudah dan bukanlah perkara susah, Indonesia dengan keragamannya niscaya akan mengalami beberapa gesekan di kehidupan masyarakatnya. Na gesekan ini tidak akan membesar apabila disikapi dengan arif oleh masyarakat, karena Indonesia memang menyimpan begitu rupa yang berbeda dan beranekaragam.

Realitas sejarah menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia berdiri tegak diantara keragaman yang ada. Hal ini tergambar bagaimana founding father menetapkan bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu nusantara, melalui konsensus bersama untuk menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa pemersatu yang dapat sekaligus menjembatani jalinan komponen bangsa.

Koentjaraningrat (1993: 5) berpendapat bahwa Indonesia dapat disebut sebagai negara plural terlengkap di dunia disamping negara Amerika. Amerika mengenal semboyan *pluribus unum*, atau mirip dengan istilah *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti banyak namun satu.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai alat pemersatu bangsa, menjadikannya pula sebagai semboyan bangsa. Hal ini menjadi pengingat kita bahwa keberadaan negeri ini yang menyimpan beranekaragam suku, agama dan budaya di dalamnya, memiliki batasan yang jelas untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Adapun sikap yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman, dapat diterapkannya beberapa hal berikut, 1) tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain; 2) tidak mengagungkan suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik; 3) menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya; 4) lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing.

Masyarakat Demokrasi dalam Konsepsi Bernegara

Abraham Lincoln (dalam Silaban T. Jane, 2013) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuasaan di dalam konstelasi bernegara ada ditangan rakyat,

sedangkan sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis dan tegak di dalam sebuah negara.

Sehingga penulis dalam hal ini memaknai masyarakat demokrasi sebagai masyarakat yang berani mengeluarkan pendapat atau apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah, dimana pergulatan masyarakat menjadi penentu bagi penguasa dalam mengambil suatu keputusan.

Maka untuk mengidentifikasi masyarakat demokrasi, berikut adalah ciri-cirinya yang disadur melalui berbagai sumber, yaitu.

1. Menyelesaikan masalah secara melembaga melalui dialog, agar tercapai kompromi, konsensus dan mufakat.
2. Partisipasi publik yang aktif dalam mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat.
3. Melibatkan diri tanpa paksaan dan intervensi siapa pun di dalam proses pemilihan kepemimpinan, baik ditingkat negara, provinsi, kabupaten/ kota hingga pada tingkat desa.
4. Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneka ragaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan transparansi politik

dan tersedianya berbagai alternatif data tindakan politik.

5. Menjarnin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat yang demokratis, keadilan merupakan cita vita bersarna yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.
6. Terciptanya keselarasan antar hubungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.

Keenam ciri diatas menggambarkan bahwa masyarakat demokrasi merupakan kesatuan individu di dalam suatu wilayah yang memiliki cita-cita luhur dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruhnya melalui konteks demokrasi sebagai slat dan ruang yang efektif untuk merealisasinya.

Belum tercapainya tujuan demokrasi di Indonesia, walau pemerintah telah melakukan konsolidasi terhadap lembaga-lembaga, struktur maupun sistem politik di Indonesia. Namun hal ini lebih disebabkan pemerintah yang belum dapat melakukan konsolidasi terhadap budaya politik di Indonesia.

Mengenai budaya politik yang dimaksud diatas, Almond dan Verba (1990) menyatakan bahwa sikap-sikap individu terhadap peran mereka sendiri di dalam sistem politik, sehingga bagaimana pemerintah mensosialisasikan sistem yang demokratis terhadap masyarakat sehingga rnasyarakat

mengerti akan peran mereka terhadap sistem politik dan ikut berpartisipasi secara aktif di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sehingga kendala mendasar di dalam proses konsolidasi pemerintah terhadap budaya politik lebih diakibatkan kepada tingkat kepercayaan publik. Sedangkan tingkat kepercayaan publik disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan keputusan kebijakan publik, pemberian pelayanan publik, serta dalam upaya penegakan hukum.

Konsepsi masyarakat demokrasi tercipta oleh elemen-elemen yang mempengaruhinya, bukan saja pemerintah, namun semua elemen suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan masyarakatnya yang plural, maka tidak ada sistem yang lebih baik ketimbang demokrasi. Demokrasi sangat nyata dan memberikan peluang yang sama bagi siapa saja yang ada di wilayahnya. Dengan kata lain, bernegara di Indonesia barang tentu perlu untuk terciptanya masyarakat demokrasi yang dimaksud, agar cita-cita negara kesejahteraan tercipta di negeri pertiwi ini.

Simpulan

Demokrasi adalah mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, atas negara

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Pada saat ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk atau sistem pemerintahan saja, akan tetapi menjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana demokrasi perlu dipraktikkan dalam berbagai kehidupan bernegara.

Sehingga masyarakat demokrasi dimaknai sebagai tatanan masyarakat di dalam suatu wilayah yang memiliki cita-cita luhur dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruhnya melalui konteks demokrasi sebagai alat dan ruang yang efektif untuk merealisasikannya.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Oaks Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara: Jakarta
- Kecuk Suhariyanto. 2017. BPS: Indeks Demokrasi Indonesia di 2016. Tunic. Diambil 12 Januari 2018, dalam laman: https://kumparan.com/@kumparan_news/bps-indeks-demokrasi-indonesia-di-2016-turun
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia: Jakarta

Silaban T. Jane, dkk. 2013. Persepsi Mahasiswa
FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi di
Indonesia. Diambil 2 Februari 2018,
dalam laman:
[http://download.portalgaruda.org/a
rticle.php,article=72860&va,4924](http://download.portalgaruda.org/article.php,article=72860&va,4924)

Website

[https://www.wowkeren.com/lirik/lagu/koles
plus/kolam-susu.html](https://www.wowkeren.com/lirik/lagu/koles
plus/kolam-susu.html)

[https://news.detik.com/berita/d-3643018/bps-
indeks-demokrasi-indonesia-turun](https://news.detik.com/berita/d-3643018/bps-
indeks-demokrasi-indonesia-turun)

[https://www.bps.go.id/Pressrelease/2017
/09/14/1401/incieks-demokrasi-](https://www.bps.go.id/Pressrelease/2017
/09/14/1401/incieks-demokrasi-)

[indonesia--idi-tingkat-nasional-2016-
mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-
idi-tingkat-nasional-2015.html](indonesia--idi-tingkat-nasional-2016-
mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-
idi-tingkat-nasional-2015.html)